



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 552/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul atau instansi terkait langsung secara substansi mengagendakan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan melakukan koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/mechanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 10 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar masing-masing di Tempat;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah masing-masing di Makassar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR:
TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGA N
			BARU	UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025		Baru			Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar	2024	
2.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024			Ubah		Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar	2024	

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR

1.	Persyaratan Teknis Sarana Penyelamatan Jiwa		Baru				2024	
----	---	--	------	--	--	--	------	--

BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA KOTA MAKASSAR

1.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan			ubah			2024	
----	---	--	--	------	--	--	------	--

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR

1.	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Makassar		Baru				2024	
2.	Tata Cara Penyelenggaraan		Baru				2024	

	Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan							
DPRD KOTA MAKASSAR								
1.	Pelaksanaan Kegiatan Reses, Konsultasi Publik, Fungsi Pengawasan dalam rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan Kunjungan Daerah Pilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar		Baru				2024	
2.	Penyediaan Makan dan Minum Tamu VIP Pimpinan DPRD		Baru				2024	
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA MAKASSAR								
1.	Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas		Baru				2024	

2.	Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Rumah Sakit Umum daerah dan Puskesmas BLUD Kota Makassar		Baru				2024	
3.	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar		Baru				2024	
4.	Pedoman Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar		Baru				2024	
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR								
1.	Pencabutan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian			ubah			2024	

	Kendaraan Bermotor							
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak		Baru				2024	
2.	Koefisien PBB-P2		Baru				2024	
3.	Nama Pengenal Usaha atau Profesi Yang dipasang Melekat Pada Bangunan dan/atau di Dalam Area Tempat Usaha Atau Profesi Yang Jenis, Ukuran, Bentuk, dan Bahan Reklamenya		Baru				2024	
4.	Perhitungan Nilai Sewa Reklame			ubah			2024	
5.	Nilai Perolehan Air Tanah			ubah			2024	
6.	Tata Cara Pelaporan bagi Pejabat		Baru				2024	

7.	Tata cara Pemberian Pengurangan BPHTB			ubah			2024	
8.	Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan			ubah			2024	
9.	Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi		Baru				2024	
10.	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal		Baru				2024	
11.	Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Dan/Atau Sanksinya			ubah			2024	
12.	Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah		Baru				2024	

13.	Tata Cara Pemungutan PBBP2			ubah			2024	
14.	Tata Cara Pengisian dan Penyampaian dan Pelaporan SPTPD		Baru				2024	
15.	Penetapan keadaan kahar (force majeure)		Baru				2024	
16.	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi			ubah			2024	
17.	Tata Cara Penagihan Piutang		Baru				2024	
18.	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak			ubah			2024	
19.	Tata Cara Penyelesaian Keberatan		Baru				2024	
20.	Tata Cara Pengawasa Pajak Daerah			ubah			2024	
21.	Tata Cara Pembetulan Atau		Baru				2024	

	Pembatalan Ketetapan Pajak							
22.	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi		Baru				2024	
23.	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif			ubah			2024	
24.	Tata Cara Pemberian Penghargaan/Rewa rd Dan Punishment			ubah			2024	
25.	Tata Cara Keberatan		Baru				2024	
26.	Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapenda			ubah			2024	
27.	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dan		Baru				2024	

	Retribusi Daerah lingkup Bapenda							
28.	Ketentuan Umum Pajak Daerah		Baru				2024	
29.	Penyelenggaraan Reklame			ubah			2024	
30.	Pemberian Insentif Fiskal PBJT		Baru				2024	
31.	Pemberian Insentif Fiskal kepada pelaku usaha hiburan kelab malam, bar, rumah minum/pub, diskotek, karaoke, panti pijat dan mandi uap/spa							
32.	Administrasi dan Tata cara Pemberian Insentif fiskal bagi pelaku usaha							
BPKAD KOTA MAKASSAR								
1.	Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Baru				2024	

	Tahun Anggaran 2023							
2.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			ubah			2024	
3.	Standar Biaya Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025		Baru				2024	
4.	Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025		Baru				2024	
5.	Harga Satuan Pokok Kegiatan dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025		Baru				2024	

6.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024		Baru				2024	
7.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024		Baru				2024	
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025		Baru				2024	
9.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025		Baru				2024	
10.	Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		Baru				2024	

	(PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar							
11.	Perubahan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024		Baru				2024	
12.	Perubahan Peraturan Wali Kota No 47 Tahun 2022 Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah		Baru				2024	
13.	Pembayaran Gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya		Baru				2024	
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR								
1.	Pengadaan Barng dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah		Baru				2024	

	Puskesmas di Lingkup Pemerintah Kota Makassar							
2.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkup Pemerintah Kota Makassar		Baru				2024	
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR								
1.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar Tahun 2024-2027		Baru				2024	
BKPSDMD KOTA MAKASSAR								
1.	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah							
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR								
1.	Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Kota		Baru				2024	

	Makassar Tahun 2024							
2.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024		Baru				2024	
3.	Penetapan Insentif Dewan Lorong pada Lorong Wisata Kota Makassar		Baru				2024	

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO